



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 158 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB II PERUBAHAN RENJA PD

### Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;

- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan
- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
  - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
  - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
  - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

#### Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

### BAB III

#### KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

#### Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketentuan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.

- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

#### BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

##### Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

##### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 03 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 03 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 158

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
BANDUNG  
NOMOR 158 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

Pemerintah  
Kabupaten Bandung



# BUPATI BANDUNG PERATURAN



PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025

DINAS DALDUKPPA  
KABUPATEN BANDUNG

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan Berkah dan Karunia-Nya, kita bersaksi bahwa Nabi Muhamad SAW adalah Nabi dan Rosul utusan Alloh SWT, penunjuk kepada jalan kebenaran dalam menempuh hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

Atas ijin Alloh SWT pula kami dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P2KBP3A) Kabupaten Bandung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, walaupun masih terdapat banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan, namun dalam penyusunan tugas ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kearah yang lebih baik.

Mudah-mudahan dengan dibuatnya Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P2KBP3A) Kabupaten Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan acuan dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan bagi segenap aparatur dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P2KBP3A) Kabupaten Bandung.

Soreang, 26 Juni 2025  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANDUNG

H. MUHAMAD HAIRUN, SH., MH.  
NIP. 19670626 199203 1 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DALDUKPPA TAHUN LALU.....</b>	<b>6</b>
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	16
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DALDUKPPA.....	50
2.3 Review terhadap Rancangan RKPD.....	52
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	62
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>72</b>
3.1 Tela'ahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	72
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DALDUKPPA Kabupaten Bandung.....	72
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DALDUKPPA Tahun 2025.....	80
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>82</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>105</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah. proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan Rancangan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan renja.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. Rancangan Awal RENJA PD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Pemerintahan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja PD di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada PD.

Rancangan Awal RENJA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025. Adapun keberhasilan pelaksanaan dari RENJA tersebut tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

- Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
  7. Lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2022 Tanggal 27 Juni Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026;
  8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  9. Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/Kep.107- Bappelitbangda/2023 Tanggal 20 Januari 2023 tentang Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
  10. Surat Edaran Bupati Nomor 000.8./011/3683/BAPPERIDA tanggal 13 tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Rancangan Awal RENJA DALDUKPPA Kabupaten Bandung ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal RENJA PD DALDUKPPA Kabupaten Bandung tahun 2025 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan DALDUKPPA tahun 2025;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh DALDUKPPA Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan upaya yaitu :

- a. Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan program dan kegiatan yang mengarah kepada Penduduk Tumbuh Seimbang.
- b. Tujuan tersebut untuk mengukur pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan, maka sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (PD) dilakukan penilaian capaian melalui laporan tahunan.
- c. Mengidentifikasi Program PD terhadap capaian kinerja Program PD periode sebelumnya.
- d. Merumuskan kesimpulan sebagai bahan dalam pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis PD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- e. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan.
- f. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.
- g. Sebagai alat tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah (PD).
- h. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan pembangunan secara terpadu terarah dan terukur
- i. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika dan Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Perubahan SKPD TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Tahun Sekarang
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4	Review terhadap Rancangan RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DALDUKPPA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DALDUKPPA Kabupaten Bandung Tahun 2024**

Dokumen Rancangan Awal RENJA PD Tahun 2025 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini, analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi PD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi perangkat daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian pada tahun berjalan pada bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung tahun 2024 dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk evaluasi program dan kegiatan tahun 2025. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 dijabarkan pada ***tabel 2.1***

**Tabel II.1 (TC.29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**  
**Kabupaten Bandung**

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai AKIP	69,56	-	82.83 %	82.83 %	82.83 %	69,16	22,61%	22,61%
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	-	99.74 %	99.74 %	99.74 %	100%	14,18%	14,18%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	97.2 %	97.2 %	97.2 %	2 Dokumen	37,22%	37,22%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	100%	100%	100%	1 Dokumen	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	100%	100%	100%	1 Dokumen	69,03%	69,03%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	100%	100%	100%	1 Dokumen	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	100%	100%	100%	1 Dokumen	19,50%	19,50%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	100%	100%	100%	1 Laporan	12,58%	12,58%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	100%	100%	100%	1 Laporan	0,00%	0,00%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>	100%	-	81.91 %	81.91 %	81.91 %	100%	23,14%	23,14%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	-	81.85 %	81.85 %	81.85 %	12 bulan	23,15%	23,15%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	-	100%	100%	100%	2 Dokumen	12,29%	12,29%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	100%	100%	100%	1 Laporan	42,90%	42,90%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	-	100%	100%	100%	1 Dokumen	18,75%	18,75%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	-	99.98 %	99.98 %	99.98 %	3 Laporan	18,38%	18,38%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	-	98.68 %	98.68 %	98.68 %	100%	3,64%	3,64%	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	-	96.71 %	96.71 %	96.71 %	1 Dokumen	0,00%	0,00%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	-	100%	100%	100%	3 Laporan	15,00%	15,00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	-	-	-	-	1 Laporan	0,00%	0,00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	-	-	-	-	1 Laporan	0,00%	0,00%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>36,48%</b>	<b>36,48%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	-	99.92 %	99.92 %	99.92 %	3 Paket	80,94%	80,94%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	-	91.48 %	91.48 %	91.48 %	2 Paket	99,99%	99,99%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	-	99.83 %	99.83 %	99.83 %	1 Paket	0,00%	0,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	-	100%	100%	100%	2 Paket	0,00%	0,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	2 Paket	-	100%	100%	100%	2 Paket	0,00%	0,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	-	100%	100%	100%	2 Dokumen	0,00%	0,00%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	-	99.99 %	99.99 %	99.99 %	12 Laporan	49,40%	49,40%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	-	95.56 %	95.56 %	95.56 %	60 Laporan	1,52%	1,52%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	-	98.82 %	98.82 %	98.82 %	2 Dokumen	0,00%	0,00%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>23,50%</b>	<b>23,50%</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	100%	100%	100%	1 kegiatan	24,75%	24,75%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 kegiatan	22,79%	22,79%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>99.7 %</b>	<b>99.7 %</b>	<b>99.7 %</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	-	99.7 %	99.7 %	99.7 %	5 Unit	0,00%	0,00%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>91.5 %</b>	<b>91.5 %</b>	<b>91.5 %</b>	<b>100%</b>	<b>12,35%</b>	<b>12,35%</b>

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	1 Laporan	-	99.86 %	99.86 %	99.86 %	1 Laporan	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	3 Laporan	-	62.37 %	62.37 %	62.37 %	3 Laporan	5,77%	5,77%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan SDM pendukung	12 Laporan	-	96.62 %	96.62 %	96.62 %	12 Laporan	15,18%	15,18%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>93.05 %</b>	<b>93.05 %</b>	<b>93.05 %</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 Unit	-	93.31 %	93.31 %	93.31 %	7 Unit	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51 Unit	-	90.02 %	90.02 %	90.02 %	51 Unit	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	-	-	-	3 Unit	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	-	99.86 %	99.86 %	99.86 %	1 Unit	0,00%	0,00%
2	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>94.99 %</b>	<b>94.99 %</b>	<b>94.99 %</b>	<b>100%</b>	<b>5,92%</b>	<b>5,92%</b>
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen kebijakan dalam pelaksanaan PUG	1 Dokumen	-	100%	100%	100%	1 Dokumen	0,00%	0,00%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek PPRG	50 Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	50 Perangkat Daerah	0,00%	0,00%
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>96.79 %</b>	<b>96.79 %</b>	<b>96.79 %</b>	<b>100%</b>	<b>9,50%</b>	<b>9,50%</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2 Organisasi	-	96.79 %	96.79 %	96.79 %	2 Organisasi	9,50%	9,50%
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>51.31 %</b>	<b>51.31 %</b>	<b>51.31 %</b>	<b>100%</b>	<b>4,40%</b>	<b>4,40%</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan perempuan yang dilaksanakan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan khusus	50 Dokumen	-	100%	100%	100%	2 Lembaga	0,00%	0,00%
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>25.97 %</b>	<b>25.97 %</b>	<b>25.97 %</b>	<b>100%</b>	<b>5,55%</b>	<b>5,55%</b>	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang	-	100%	100%	100%	50 Dokumen	6,07%	6,07%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	20,57%	20,57%	20,57%	50 Dokumen	5,81%	5,81%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota(UPTD PPA)	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	50 Dokumen	0,00%	0,00%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>78.49 %</b>	<b>78.49 %</b>	<b>78.49 %</b>	<b>100%</b>	<b>10,29%</b>	<b>10,29%</b>
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Desa</b>	<b>-</b>	<b>81.07 %</b>	<b>81.07 %</b>	<b>81.07 %</b>	<b>1 Desa</b>	<b>10,88%</b>	<b>10,88%</b>
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah terbentuknya Desa P2WKSS percontohan Tk. Kabupaten	2 Laporan	-	81,07%	81,07%	81,07%	2 Laporan	10,88%	10,88%
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Yang Terbina	1 Dokumen	-	100,0%	100,0%	100,0%	1 Dokumen	0,00%	0,00%
	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase keluarga yang terlayani dalam bidang KG dan hak anak</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>67.93 %</b>	<b>67.93 %</b>	<b>67.93 %</b>	<b>100%</b>	<b>12,81%</b>	<b>12,81%</b>
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan dalam bidang KG dan hak anak	50 Layanan	-	67.93 %	67.93 %	67.93 %	50 Layanan	12,81%	12,81%
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase data terpilah anak</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>99.39 %</b>	<b>99.39 %</b>	<b>99.39 %</b>	<b>100%</b>	<b>20,88%</b>	<b>20,88%</b>
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>99.39 %</b>	<b>99.39 %</b>	<b>99.39 %</b>	<b>100%</b>	<b>20,88%</b>	<b>20,88%</b>
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Dokumen	-	100%	100%	100%	31 Dokumen	30,09%	30,09%
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah PD yang memanfaatkan data gender dan anak	47 Dokumen	-	98.16 %	98.16 %	98.16 %	47 Dokumen	9,19%	9,19%
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>99.96 %</b>	<b>99.96 %</b>	<b>99.96 %</b>	<b>100%</b>	<b>6,87%</b>	<b>6,87%</b>
	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase lembaga PHA yang melakukan pendampingan hak anak</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>99.92 %</b>	<b>99.92 %</b>	<b>99.92 %</b>	<b>100%</b>	<b>7,68%</b>	<b>7,68%</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	39 Organisasi	-	99.92 %	99.92 %	99.92 %	39 Organisasi	7,68%	7,68%

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina	100%	-	100%	100%	100%	100%	5,94%	5,94%
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	-	100%	100%	100%	39 Organisasi	5,94%	5,94%
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>	100%	-	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten</b>	2 kegiatan	-	100%	100%	100%	2 kegiatan	0,00%	0,00%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi	-	100%	100%	100%	2 Organisasi	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan	50 Dokumen	-	-	-	-	50 Dokumen	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(UPTD PPA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	50 Dokumen	0,00%	0,00%
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus</b>	100%	-	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus	310 Orang	-	100%	100%	100%	310 Orang	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota(UPTD PPA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	0,00%	0,00%
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0,00%	0,00%
4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>TFR (angka kelahiran total)</b>	<b>2,40</b>	<b>-</b>	<b>91.1 %</b>	<b>91.1 %</b>	<b>91.1 %</b>	<b>2,42</b>	<b>3,31%</b>	<b>3,31%</b>
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>persentase kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>91.79 %</b>	<b>91.79 %</b>	<b>91.79 %</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan kebijakan perihal persentase pemanfaatan hasil penyusunan GDPK yang dimiliki Kabupaten Bandung	1 Dokumen	-	100%	100%	100%	1 Dokumen	0,00%	0,00%
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang dimiliki Kabupaten	3 Laporan	-	100%	100%	100%	3 Laporan	0,00%	0,00%

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	10 organisasi	-	100%	100%	100%	10 organisasi	0,00%	0,00%
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK (UPTD Pengendalian Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga)	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengendalian program KKBPK	2 Laporan	-	2.5 %	2.5 %	2.5 %	2 Laporan	0,00%	0,00%
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase data pengendalian penduduk yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>90.53 %</b>	<b>90.53 %</b>	<b>90.53 %</b>		<b>4,00%</b>	<b>4,00%</b>
	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah kebijakan terkait perumusan parameter kependudukan	1 Laporan	-	100%	100%	100%	1 Laporan	0,00%	0,00%
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (UPTD Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan)	Jumlah dokumen terkait penyediaan dan pengolahan data kependudukan	1 Dokumen	-	100%	100%	100%	1 Dokumen	0,00%	0,00%
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	1 Dokumen	-	100%	100%	100%	1 Dokumen	0,00%	0,00%
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah pembentukan Rumah Data Kependudukan Di Kampung Kb Untuk Memperkuat Integrasi Program Kkbpk Di Sektor Lain	2 Unit	-	100%	100%	100%	2 Unit	0,00%	0,00%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	-	99.45 %	99.45 %	99.45 %	1 Laporan	43,00%	43,00%
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen data dan informasi keluarga	2 Dokumen	-	46.32 %	46.32 %	46.32 %	2 Dokumen	0,00%	0,00%
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (UPTD Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga)	Jumlah data Keluarga	1 Laporan	-	99.75 %	99.75 %	99.75 %	1 Laporan	53,85%	53,85%
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen hasil pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB di Kabupaten Bandung	2 Dokumen	-	100%	100%	100%	2 Dokumen	1,37%	1,37%
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	2 Laporan	-	100%	100%	100%	2 Laporan	33,15%	33,15%
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru</b>	<b>83,48%</b>	<b>-</b>	<b>94.66 %</b>	<b>94.66 %</b>	<b>94.66 %</b>	<b>83%</b>	<b>2,23%</b>	<b>2,23%</b>
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Jumlah peserta KB baru- Persentase Institusi masyarakat pedesaan yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>90.53 %</b>	<b>90.53 %</b>	<b>90.53 %</b>	<b>100%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,75%</b>
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	-	100%	100%	100%	10 Organisasi	0,00%	0,00%
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal (UPTD Promosi KB Melalui Kearifan Budaya Lokal)	Frekuensi terlaksananya jenis KIE melalui moment strategis	4 Dokumen	-	65.95 %	65.95 %	65.95 %	4 Dokumen	1,21%	1,21%
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (UPTD Pemanfaatan Media Massa Cetak dan Media Luar Ruang)	Jumlah kebijakan terkait sarana promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	1 Dokumen	-	100%	100%	100%	1 Dokumen	0,00%	0,00%
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya	Jumlah penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam	-	-	80 %	80 %	80 %	31 Laporan	0,00%	0,00%

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	pencitraan program KKBPK								
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah kegiatan Mekanisme Operasional program KKBPK	-	-	-	-	-	2 Laporan	0,00%	0,00%
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (UPTD Mekanisme Operasional Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK))	Jumlah kegiatan Mekanisme Operasional program KKBPK	2 Laporan	-	99,87 %	99,87 %	99,87 %	2 Laporan	0,00%	0,00%
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (UPTD Pengelolaan Balai Penyuluhan)	Jumlah Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		-	84,54 %	84,54 %	84,54 %	31 Laporan	0,00%	0,00%
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Paguyuban yang berperan dalam Program KKBPK	31 Laporan	-	100%	100%	100%	31 Laporan	20,49%	20,49%
	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina</b>	<b>31 Kecamatan</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>31 Kecamatan</b>	<b>4,12%</b>	<b>4,12%</b>
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	jumlah IMP yang dibina	1 Organisasi	-	100%	100%	100%	1 Organisasi	4,46%	4,46%
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB(UPTD Sarana PLKB)(UPTD Sarana PLKB)	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB PNS dan Non PNS	1 Unit	-	99,99 %	99,99 %	99,99 %	1 Unit	0,00%	0,00%
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (UPTD Pergerakan Lini Lapangan)	Jumlah Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	-	99,99 %	99,99 %	99,99 %	1 Laporan	10,00%	10,00%
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (UPTD Pergerakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP))	Jumlah pelaksanaan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (Pos KB dan Sub PPKBD)	4.643 Orang	-	100%	100%	100%	4.643 Orang	0,00%	0,00%
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>1,83%</b>	<b>1,83%</b>
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (UPTD Distribusi Alokon)	Jumlah Faskes yang memperoleh sarana penunjang pelayanan KB	79 Laporan	-	85,05 %	85,05 %	85,05 %	79 Laporan	21,38%	21,38%
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meningkat	21000Orang	-	99,94 %	99,94 %	99,94 %	21000Orang	0,00%	0,00%
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (UPTD Metode Kontrasepsi Jangka Pajang)	Jumlah Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meningkat	-	-	-	-	-	12 Laporan	0,00%	0,00%
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (UPTD Penyediaan Sarana Pelayanan KB)	Jumlah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	-	94,13 %	94,13 %	94,13 %	31 Laporan	0,00%	0,00%
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	12 Laporan	-	100%	100%	100%	31 Laporan	29,40%	29,40%

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (UPTD Pembina Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana)	Reproduksi di Fasilitas Kesehatan								
	Peningkatan Kesertaan KB Pria (UPTD KB Pria)	Jumlah Kesertaan KB Pria meningkat	70 Orang	-	100%	100%	100%	70 Orang	22,56%	22,56%
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>persentase PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,84%</b>
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (UPTD Kemitraan KB)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang berperan serta dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Organisasi	-	100%	100%	100%	1 Organisasi	0,00%	0,00%
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (UPTD Pengelolaan Kampung KB)	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	97 Kampung	-	100%	100%	100%	97 Kampung	0,87%	0,87%
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Presentase pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>97.78 %</b>	<b>97.78 %</b>	<b>97.78 %</b>	<b>100%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,13%</b>
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>97.78 %</b>	<b>97.78 %</b>	<b>97.78 %</b>	<b>100%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,13%</b>
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.000 Unit	-	92.42 %	92.42 %	92.42 %	3.000 Unit	0,00%	0,00%
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (UPTD Pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga)	Jumlah kelompok pengelola bina keluarga yang mendapat pelatihan tenaga pendampingan tentang bina keluarga	2 Laporan	-	100%	100%	100%	2 Laporan	0,00%	0,00%
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (UPTD pembinaan Kader Ekonomi Keluarga)	Jumlah kelompok pelaksana bina keluarga yang mendapat pelatihan tenaga pendampingan tentang bina keluarga	95 Orang	-	100%	100%	100%	95 Orang	0,00%	0,00%
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	100%	100%	100%	2 Laporan	0,00%	0,00%
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (UPTD Generasi Berencana)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat promosi dan sosialisasi tentang orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutan serta pengelolaan keuangan keluarga	2 Laporan	-	99.98 %	99.98 %	99.98 %	2 Laporan	0,00%	0,00%
	Sosialisasi IPK	Jumlah sosialisasi IPK yang dilaksanakan	40 Orang	-	100%	100%	100%	40 Orang	11,11%	11,11%
	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan</b>	<b>Persentase Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Keluarga									
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	0,00%	0,00%

## **2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Adapun hasil capaian kinerja pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel T-C-30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**DALDUKPPAKabupaten Bandung**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Total Fertility Rate			2,42	2,29	2,28	2,27	2,26	2,3	2,29	2,21	-	-	108,22%	100,00%	103,17%	-	-
2	Cakupan Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga			89,32	89,42	89,52	89,62	89,72	98,72	94,44	89,7	-	-	110,53%	105,62%	100,20%	-	-
3	Nilai Akip			69,16	69,26	69,36	69,46	69,56	70,6	75,9	80,35	-	-	102,80%	10959,00%	115,84%	-	-
4	Presentase Aset Dalam kondisi Baik			85,5	86	86,5	87	87,5	98,4	94,58	90	-	-	115,09%	109,98%	104,05%	-	-
5	Indeks Pembangunan Gender			94,16	93,97	93,99	94,01	94,03	93,88	93,97	94,36	-	-	99,86%	100,00%	100,39%	-	-
6	Presentase Kecamatan Layak Anak			16	17	17	17	17	17	17	17	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

## 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DALDUKPPA

a. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi :

1. Kepala Dinas 1 (satu) orang
2. Sekretaris Dinas 1 (satu) orang
3. Dibawah Sekretaris ada 3 (tiga) orang, terdiri dari:
  - Perencana Ahli Pertama
  - Kepala sub bagian keuangan
  - Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk 1 (satu) orang, yang dibawahnya ada 3 (tiga) orang jabatan fungsional, yang terdiri dari:
  - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 (satu) orang, yang dibawahnya ada 3 (tiga) orang jabatan fungsional, yang terdiri dari:
  - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 1 (satu) orang, yang dibawahnya ada 3 (tiga) orang jabatan fungsional, yang terdiri dari:
  - Analis Kebijakan
7. Kepala Bidang Perlindungan Anak 1 (satu) orang, yang dibawahnya ada 3 (tiga) orang jabatan fungsional, yang terdiri dari:
  - Analis Kebijakan

Sumber daya manusia tersebut telah mencukupi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat secara riil juga didukung oleh sumber daya manusia yang berada dilapangan yang terdiri 69 petugas Penyuluh KB. Meskipun dari segi standar pelayanan minimal masih kurang dari rasio, yaitu 1 petugas membawahi 2-4 desa (standar SPM 1 petugas : 2 desa) namun demikian selalu di upayakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.

b. Permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1) Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan lintas sektoral sehingga sasaran program kerja yang telah dibuat kurang maksimal;

- b. Kurangnya sumber daya manusia yang cukup sehingga tidak semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan maksimal;
  - c. Kurangnya dukungan anggaran pada beberapa kegiatan;
  - d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengendalian penduduk serta perlindungan perempuan dan anak, sehingga masih diperlukan upaya yang optimal informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengendalian penduduk dan perlindungan perempuan dan anak.
- 2) Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi
- a. Koordinasi yang belum menyeluruh sehingga menghambat dalam proses pelayanan publik,
  - b. Pemahaman aparaturnya terhadap tugas dan fungsi belum maksimal,
  - c. Inovasi dan kreatifitas dalam menjalankan tugas dan fungsi aparaturnya masih kurang,
  - d. Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah
- a. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerah melalui pembangunan berkelanjutan akan membutuhkan waktu yang lama,
  - b. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat lambat dan berakibat kepercayaan pada pemerintah akan menurun,
- 4) Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- a. Tantangan
    - Kurangnya jumlah Penyuluh Keluarga Berencana/PKB (rasio PKB dibandingkan jumlah desa/kelurahan) serta kualitasnya (pengetahuan dan keterampilan)
    - Belum optimalnya fungsi organisasi DALDUKPPA
  - b. Peluang
    - Struktur organisasi yang jelas (Perbup Nomor 15 Tahun 2022)
    - Adanya komitmen pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
    - Adanya team work yang kuat dalam pelaksanaan tugas
    - Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi
  - c. Isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DALDUKPPA ) Kabupaten Bandung
    - Adanya kasus tindak kekerasan KDRT, trafficking;
    - Perlunya lembaga perlindungan perempuan dan anak;
    - Peran serta perempuan dalam kegiatan usaha masih rendah;
    - PUS ingin ber KB tapi belum ber-KB masih tinggi;
    - Masih tingginya perkawinan usia < 20;
    - Data mikro kependudukan yang perlu diperbaiki.

### **2.3 Review terhadap Rancangan RKPD**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

RPJMD Kabupaten Bandung dalam penyusunannya dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

Rancangan RKPD disusun berdasarkan kebutuhan untuk mencapai kinerja yang telah disusun. Sehingga diharapkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar mendukung kinerja DALDUKPPA, rencana Program dan Kegiatan DALDUKPPA Kabupaten Bandung selama kurun waktu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025**  
**Kabupaten Bandung**  
**DALDUKPPA**

RANCANGAN RKPD					HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP</b>	<b>69,46</b>				<b>Nilai SAKIP</b>	<b>69,46</b>	<b>24.043.356.912,00</b>	
		<b>Presentase Aset Dalam kondisi Baik</b>	<b>87,0%</b>				<b>Presentase Aset Dalam kondisi Baik</b>	<b>87,0%</b>		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>139.000.000,00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>139.000.000,00</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	52.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	52.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	7.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	7.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	7.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	7.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	24.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	24.000.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	35.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	35.000.000,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	1.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1.000.000,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab, Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	20 Data	1.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab, Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	20 Data	1.000.000,00	

RANCANGAN RKPD					HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>22.753.882.912,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>22.753.882.912,00</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab, Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang	22.703.882.912,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab, Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang	22.703.882.912,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	8.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	8.000.000,00	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	7.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	7.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	25.000.000,00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	-	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000,00</b>	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>97.900.000,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>97.900.000,00</b>	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab, Bandung	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab, Bandung	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	-	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab, Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	218 Paket	20.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab, Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	218 Paket	20.000.000,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab, Bandung	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab, Bandung	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	-	

RANCANGAN RKPD					HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	36.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	36.000.000,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab, Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	6.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab, Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	6.000.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab, Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	11.900.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab, Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	35.900.000,00	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>302.574.000,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>302.574.000,00</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab, Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab, Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab, Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	120.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab, Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	120.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab, Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab, Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab, Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab, Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab, Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab, Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.000.000,00	
Penyediaan Bahan/Material	Kab, Bandung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab, Bandung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.574.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.574.000,00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	-	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000,00</b>	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab, Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab, Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	
Pengadaan Mebel	Kab, Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	20.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kab, Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	20.000.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab, Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab, Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0		

RANCANGAN RKPD					HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>379.000.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>379.000.000,00</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	75.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	75.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>243.000.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>243.000.000,00</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab, Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	42.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab, Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	42.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab, Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	121.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab, Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	121.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab, Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab, Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab, Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab, Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	
<b>Jumlah 1</b>				<b>24.043.356.912,00</b>	<b>Jumlah 1</b>				<b>24.043.356.912,00</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>790.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>790.000.000,00</b>	
		<b>Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD</b>	<b>12,00%</b>				<b>Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD</b>	<b>12,00%</b>		
		<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>	<b>68,07</b>				<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>	<b>68,07</b>		
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentase lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender</b>	<b>100%</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentase lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender</b>	<b>100%</b>	<b>195.000.000,00</b>	

RANCANGAN RKP					HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000,00	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab, Bandung	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	50 Orang	80.000.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab, Bandung	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	50 Orang	80.000.000,00	
Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab, Bandung	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	35.000.000,00	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab, Bandung	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	35.000.000,00	
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>50%</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>50%</b>	<b>120.000.000,00</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab, Bandung	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi	120.000.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab, Bandung	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi	120.000.000,00	
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG</b>	<b>100%</b>	<b>475.000.000,00</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG</b>	<b>100%</b>	<b>475.000.000,00</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 lembaga	475.000.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 lembaga	475.000.000,00	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	-	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		<b>Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		<b>Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000,00</b>	
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan perempuan yang dilaksanakan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan perempuan yang dilaksanakan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>60.000.000,00</b>	

RANCANGAN RKPD					HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	50 Dokumen	60.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	50 Dokumen	60.000.000,00	
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>persentase kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan</b>	<b>100%</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>persentase kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan</b>	<b>100%</b>	<b>65.000.000,00</b>	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Orang	65.000.000,00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Orang	65.000.000,00	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>		<b>Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga</b>	<b>100%</b>	<b>344.813.000,00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>		<b>Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga</b>	<b>100%</b>	<b>344.813.000,00</b>	
<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Desa</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Desa</b>	<b>160.000.000,00</b>	
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	160.000.000,00	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	160.000.000,00	
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>70.000.000,00</b>	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.000.000,00	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.000.000,00	

RANCANGAN RKP					HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase keluarga yang terlayani dalam bidang KG dan hak anak	100%	114.813.000,00	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase keluarga yang terlayani dalam bidang KG dan hak anak	100%	114.813.000,00	
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Layanan	114.813.000,00	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Layanan	114.813.000,00	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>		<b>Persentase data terpilah anak</b>	<b>100%</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>		<b>Persentase data terpilah anak</b>	<b>100%</b>	<b>144.000.000,00</b>	
<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak</b>	<b>100%</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak</b>	<b>100%</b>	<b>144.000.000,00</b>	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	31 Dokumen	74.000.000,00	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	31 Dokumen	74.000.000,00	
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.000.000,00	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.000.000,00	
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>		<b>Persentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak</b>	<b>100%</b>	<b>172.657.000,00</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>		<b>Persentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak</b>	<b>100%</b>	<b>172.657.000,00</b>	
<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase lembaga PHA yang melakukan pendampingan hak anak</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase lembaga PHA yang melakukan pendampingan hak anak</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000,00</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	39 Organisasi	70.000.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	39 Organisasi	70.000.000,00	
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina</b>	<b>100%</b>	<b>102.657.000,00</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina</b>	<b>100%</b>	<b>102.657.000,00</b>	

RANCANGAN RKPD					HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Orang	72.657.000,00	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Orang	72.657.000,00	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	30.000.000,00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	30.000.000,00	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		<b>Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>	<b>100%</b>	<b>430.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		<b>Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>	<b>100%</b>	<b>430.000.000,00</b>	
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>115.000.000,00</b>	
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kab, Bandung	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	55.000.000,00	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kab, Bandung	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	55.000.000,00	
koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kab, Bandung	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	50 Dokumen	60.000.000,00	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kab, Bandung	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	50 Dokumen	60.000.000,00	
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>persentase anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus</b>	<b>100%</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>persentase anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus</b>	<b>100%</b>	<b>315.000.000,00</b>	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	45.000.000,00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	45.000.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kab, Bandung	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	30 Layanan	20.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kab, Bandung	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	30 Layanan	20.000.000,00	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>		<b>TFR (angka kelahiran total)</b>	<b>2,27</b>	<b>242.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>		<b>TFR (angka kelahiran total)</b>	<b>2,27</b>	<b>242.000.000,00</b>	

RANCANGAN RKPD					HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	79,25				Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	79,25		
		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,10				Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,10		
<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>		<b>persentase kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>		<b>persentase kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>108.000.000,00</b>	
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah dokumen dan kebijakan perihal persentase pemanfaatan hasil penyusunan GDPK yang dimiliki Kabupaten Bandung	1 Dokumen	20.000.000,00	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab, Bandung	Jumlah dokumen dan kebijakan perihal persentase pemanfaatan hasil penyusunan GDPK yang dimiliki Kabupaten Bandung	1 Dokumen	20.000.000,00	
Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kab, Bandung	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	3 Organisasi	18.000.000,00	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab, Bandung	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	3 Organisasi	18.000.000,00	
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab, Bandung	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0	-	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab, Bandung	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0	-	
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kab, Bandung	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	3 Kegiatan	20.000.000,00	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kab, Bandung	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	3 Kegiatan	20.000.000,00	
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 kegiatan	50.000.000,00	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 kegiatan	50.000.000,00	
<b>Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota</b>		<b>persentase data pengendalian penduduk yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>134.000.000,00</b>	<b>Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota</b>		<b>persentase data pengendalian penduduk yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>134.000.000,00</b>	
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	10.000.000,00	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	10.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	10.000.000,00	
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab, Bandung	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	25.250.000,00	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab, Bandung	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	25.250.000,00	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	10.000.000,00	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	10.000.000,00	

RANCANGAN RKP					HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dolumen	10.000.000,00	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dolumen	10.000.000,00	
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kab, Bandung	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	2 Unit	38.750.000,00	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kab, Bandung	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	2 Unit	38.750.000,00	
Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokumen	10.000.000,00	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokumen	10.000.000,00	
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Kab, Bandung	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	2 Laporan	10.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Kab, Bandung	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	2 Laporan	10.000.000,00	
Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	10.000.000,00	
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>		<b>Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru</b>	<b>83,48%</b>	<b>5.093.120.000,00</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>		<b>Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru</b>	<b>83,48%</b>	<b>5.093.120.000,00</b>	
<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>		<b>Pesentase Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB</b>	<b>100%</b>	<b>235.450.000,00</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>		<b>Pesentase Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB</b>	<b>100%</b>	<b>235.450.000,00</b>	
Pengendalian Program KKBPK	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	31 Laporan	30.000.000,00	Pengendalian Program KKBPK	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	31 Laporan	30.000.000,00	
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Kab, Bandung	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Unit	5.000.000,00	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Kab, Bandung	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Unit	5.000.000,00	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Laporan	60.450.000,00	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Laporan	60.450.000,00	
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	15.000.000,00	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	15.000.000,00	

RANCANGAN RKP					HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab, Bandung	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	85.000.000,00	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab, Bandung	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	85.000.000,00	
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab, Bandung	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 Organisasi	40.000.000,00	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab, Bandung	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 Organisasi	40.000.000,00	
<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>		<b>Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina</b>		<b>4.486.500.000,00</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>		<b>Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina</b>		<b>4.486.500.000,00</b>	
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab, Bandung	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	150 Unit	30.000.000,00	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab, Bandung	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	150 Unit	30.000.000,00	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab, Bandung	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4653 Orang	2.492.500.000,00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab, Bandung	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4653 Orang	2.492.500.000,00	
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab, Bandung	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	3 Organisasi	70.000.000,00	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab, Bandung	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	3 Organisasi	70.000.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	1.894.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	1.894.000.000,00	
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB</b>	<b>100%</b>	<b>291.170.000,00</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB</b>	<b>100%</b>	<b>291.170.000,00</b>	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab, Bandung	Jumlah Faskes yang memperoleh sarana penunjang pelayanan KB	12 Laporan	74.870.000,00	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab, Bandung	Jumlah Faskes yang memperoleh sarana penunjang pelayanan KB	12 Laporan	74.870.000,00	

RANCANGAN RKPD					HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab, Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100.000 Orang	86.300.000,00	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab, Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100.000 Orang	86.300.000,00	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	50.000.000,00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	50.000.000,00	
Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab, Bandung	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	30 Orang	80.000.000,00	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab, Bandung	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	30 Orang	80.000.000,00	
<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>		<b>persentase PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>		<b>persentase PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000,00</b>	
Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab, Bandung	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 Organisasi	50.000.000,00	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab, Bandung	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 Organisasi	50.000.000,00	
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0 kegiatan	-	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab, Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0 kegiatan	-	
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	0 kegiatan	-	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	0 kegiatan	-	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab, Bandung		97 Kampung	30.000.000,00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab, Bandung		97 Kampung	30.000.000,00	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>		<b>Presentase pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera</b>	<b>100%</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>		<b>Presentase pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera</b>	<b>100%</b>	<b>390.000.000,00</b>	
<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga</b>		<b>305.000.000,00</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga</b>		<b>305.000.000,00</b>	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	2 Laporan	100.000.000,00	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	2 Laporan	100.000.000,00	

RANCANGAN RKPD					HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab, Bandung	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1 Unit	30.000.000,00	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab, Bandung	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1 Unit	30.000.000,00	
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab, Bandung	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	95 Orang	75.000.000,00	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab, Bandung	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	95 Orang	75.000.000,00	
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2 Laporan	75.000.000,00	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2 Laporan	75.000.000,00	
Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab, Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	40 Orang	25.000.000,00	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab, Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	40 Orang	25.000.000,00	
<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>Persentase Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten</b>		<b>85.000.000,00</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>Persentase Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten</b>		<b>85.000.000,00</b>	
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	85.000.000,00	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab, Bandung	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	85.000.000,00	
<b>Jumlah 2</b>				<b>7.731.590.000,00</b>	<b>Jumlah 2</b>				<b>7.731.590.000,00</b>	
<b>Jumlah Total</b>				<b>31.774.946.912,00</b>	<b>Jumlah Total</b>				<b>31.774.946.912,00</b>	

## 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja DALDUKPPA didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada DALDUKPPA selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi maupun SKPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Masukan dan harapan tersebut adalah sebagai berikut :

- *Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan*

Dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk sangat diperlukan adanya data dan informasi yang menggambarkan situasi dan kondisi mengenai aspek-aspek yang terkait dengan kependudukan dan KB. Semakin lengkap dan akurat data/informasi kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pengendalian penduduk.

- *Bidang Keluarga Berencana*

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan KB perlu adanya jaminan ketersediaan alkon sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi secara gratis. Sekaligus pembinaan terhadap akseptor aktif sehingga tidak terjadi DO.

- *Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*

Dalam hal peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga masyarakat mengharapkan penyertaan modal usaha pada kelompok yang ada di desa, yaitu kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) masuk dalam penyertaan modal dari provinsi/pusat. Selain itu, dalam hal program ketahanan keluarga masyarakat menghendaki adanya pembinaan bagi kelompok bina-bina (BKB, BKL, BKR). Permasalahan remaja yang berhubungan dengan seksualitas, HIV/AIDS, dan Napza perlu penanangan melalui program kesehatan reproduksi remaja, serta Genre perlu digencarkan juga ke seluruh remaja yang ada di Kabupaten Bandung

- *Bidang Pemberdayaan Perempuan*

Dalam hal peningkatan pendapatan perempuan diharapkan adanya pembinaan melalui berbagai pelatihan keterampilan dan juga bantuan modal usaha. Semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan mengharuskan pemerintah hadir untuk memberikan dukungan, baik dana maupun pendampingan dalam penyelesaian kasus.

- Bidang Perlindungan Anak

Dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Aparat Penegak Hukum, pembimbing kemasyarakatan dan relawan pendamping, membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang pemenuhan hak anak. Semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap anak mengharuskan pemerintah hadir untuk memberikan dukungan, baik dana maupun pendampingan dalam penyelesaian kasus.

**Tabel II.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan DALDUKPPA Perubahan Tahun 2025**  
**Kabupaten Bandung**

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				34.312.571.209,88	59.204.967.346,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				34.312.571.209,88	59.204.967.346,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.720.829.050,00	1.827.342.190,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100 12 68,07 %	100 12 68,07 %	1.234.462.700,00	792.231.850,00
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender	100 %	100 %	281.430.000,00	281.430.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	206.436.000,00	80.975.400,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota					
	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	50 Orang	50 Orang	51.184.000,00	46.684.000,00
Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota					
	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	50 Orang	50 Orang	23.810.000,00	22.755.300,00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 %	50 %	498.501.500,00	498.501.500,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					
	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi	2 Organisasi	498.501.500,00	187.285.950,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG	100 %	100 %	454.531.200,00	454.531.200,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Lembaga	2 Lembaga	454.531.200,00	454.531.200,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan	100 %	100 %	110.440.600,00	82.832.860,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan perempuan yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	47.860.600,00	47.860.600,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	50 Dokumen	47.860.600,00	19.855.300,00
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	100 %	100 %	62.580.000,00	62.580.000,00
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Orang	30 Orang	62.580.000,00	62.977.560,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga	100 %	100 %	588.721.100,00	446.667.200,00
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Desa	1 Desa	156.375.000,00	156.375.000,00
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	156.375.000,00	71.605.300,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	47.125.900,00	47.125.900,00
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	47.125.900,00	47.125.900,00
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	385.220.200,00	385.220.200,00
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Layanan	50 Layanan	385.220.200,00	327.936.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data terpilah anak	100 %	100 %	141.455.000,00	66.246.000,00
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak	100 %	100 %	141.455.000,00	141.455.000,00
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota					

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	31 Dokumen	31 Dokumen	99.700.000,00	42.171.000,00
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	41.755.000,00	24.075.000,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak	100 %	100 %	151.507.550,00	113.662.350,00
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak	100 %	100 %	66.779.950,00	66.779.950,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	39 Organisasi	39 Organisasi	66.779.950,00	50.209.950,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina	100 %	100 %	84.727.600,00	84.727.600,00
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Orang	51 Orang	66.997.300,00	49.577.100,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	17.730.300,00	13.875.300,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 %	100 %	494.242.100,00	325.701.930,00
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten	2 kegiatan	2 kegiatan	198.936.500,00	198.936.500,00
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA					
	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	50 Orang	148.600.000,00	42.781.100,00
koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota					
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	50 Dokumen	50 Dokumen	50.336.500,00	23.400.530,00
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus	100 %	100 %	295.305.600,00	295.305.600,00
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	50 Orang	25.950.300,00	0,00
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK					
	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	30 Layanan	30 Layanan	269.355.300,00	259.520.300,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				31.591.742.159,88	57.377.625.156,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai AKIP Presentase Aset Dalam kondisi Baik	69,46 87 Poin %	80,36 87 Poin %	25.284.894.270,88	26.214.563.539,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	123.347.800,00	123.347.800,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	46.546.500,00	45.496.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.370.000,00	3.850.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	1.240.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.370.000,00	2.180.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	1.435.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	16.424.200,00	14.899.200,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	33.637.100,00	11.981.100,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	20 Data	20 Data	1.000.000,00	1.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	23.990.626.070,88	23.990.626.070,88
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/bulan	97 Orang/bulan	23.946.316.470,88	25.284.331.039,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	8.785.000,00	8.785.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.475.000,00	2.465.000,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.050.000,00	3.100.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	24.999.600,00	2.622.600,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	42.090.400,00	42.090.400,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.660.400,00	16.500.400,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	21.430.000,00	21.430.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 %	100 %	84.250.000,00	84.250.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	218 Paket	218 Paket	20.000.000,00	0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	218 Dokumen	218 Dokumen	22.350.000,00	20.660.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	35.900.000,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 %	100 %	294.580.000,00	294.580.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi					
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	15.637.700,00	5.677.100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	114.890.300,00	63.605.200,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	11.452.000,00	10.216.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	3.999.000,00
Penyediaan Bahan/Material					
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.170.000,00	24.170.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu					
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	98.430.000,00	23.746.685,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00
Pengadaan Mebel					
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	467.000.000,00	467.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	388.000.000,00	402.373.715,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	273.000.000,00	273.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.000.000,00	35.350.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	51 Unit	121.000.000,00	87.450.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	105.000.000,00	0,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need) TFR (angka kelahiran total) Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	10,10 2,27 79,25 % Kelahiran/ n/lbu Angka	10,10 2,27 79,25 % Kelahiran/ bu Angka	220.621.189,00	757.840.968,00
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	persentase kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi	100 %	100 %	100.901.200,00	100.901.200,00
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota					
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	16.635.300,00	0,00
Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan					
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	3 Organisasi	3 Organisasi	17.859.300,00	0,00
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal					
	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	18.175.300,00	0,00
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana					
	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	48.231.300,00	5.016.000,00
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase data pengendalian penduduk yang diimplementasikan	100 %	100 %	119.719.989,00	119.719.989,00
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan					
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	5.120.000,00	60.000.000,00
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga					
	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	2 Dokumen	14.083.000,00	0,00
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	6.530.000,00	279.000.000,00
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	36.970.000,00	408.970.000,00
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain					
	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	2 Unit	2 Unit	37.036.300,00	546.000,00
Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB					

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.248.721,00	0,00
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana					
	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	2 Laporan	2 Laporan	5.598.968,00	4.308.968,00
Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)					
	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	4.133.000,00	0,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru	83.48 %	83.48 %	5.660.044.200,00	13.221.375.296,00
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pesentase Institusi masyarakat pedesaan yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa	100 %	100 %	140.231.200,00	140.231.200,00
Pengendalian Program KKBPK					
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	31 Laporan	31 Laporan	15.030.000,00	8.205.000,00
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana					
	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana					
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	31 Laporan	0,00	620.000.000,00
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Laporan	2 Laporan	0,00	465.000.000,00
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	14.800.000,00	67.650.000,00
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal					
	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	71.620.900,00	3.900.000,00
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 Organisasi	2 Organisasi	33.780.300,00	200.000.000,00
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina	31 kecamatan	31 kecamatan	5.216.979.100,00	5.216.979.100,00
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB					
	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	150 Unit	150 Unit	23.750.000,00	0,00
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4653 Orang	4653 Orang	2.564.000.000,00	3.437.957.300,00
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	3 Organisasi	3 Organisasi	54.848.500,00	22.886.600,00
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	12 Laporan	2.574.380.600,00	2.439.341.500,00
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB	100 %	100 %	260.773.300,00	260.773.300,00
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	71.235.600,00	11.220.300,00
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100000 Orang	100000 Orang	86.211.000,00	5.424.310.796,00
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	47.015.900,00	30.345.300,00
Peningkatan Kesertaan KB Pria					
	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	30 Orang	30 Orang	56.310.800,00	23.733.200,00
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	persentase PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB	100 %	100 %	42.060.600,00	42.060.600,00
Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 Organisasi	5 Organisasi	12.235.300,00	0,00
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					
	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	97 Kampung	97 Kampung	29.825.300,00	461.825.300,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	100 %	100 %	426.182.500,00	17.183.845.353,00
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga	100 %	100 %	317.874.200,00	317.874.200,00
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)					
	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	1 Laporan / Dokumen	0,00	9.600.000,00
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	2 Laporan	92.401.600,00	31.927.000,00
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1 Unit	1 Unit	15.900.000,00	169.000.000,00
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	95 Orang	95 Orang	50.340.000,00	7.056.200,00
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2 Laporan	2 Laporan	68.687.300,00	17.875.000,00
Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	40 Orang	40 Orang	90.545.300,00	23.301.400,00
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	100	100	108.308.300,00	108.308.300,00
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja					
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	2 Laporan	108.308.300,00	173.085.753,00
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					
	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	8376 laporan	0,00	8.376.000.000,00
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					
	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	8376 laporan	0,00	8.376.000.000,00
<b>Total</b>				<b>34.312.571.209,88</b>	<b>59.204.967.346,00</b>

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Tela'ahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja DALDUKPPA tahun 2025 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan yang tertuang dalam visi DALDUKPPA harus dicapai melalui program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan bagian dari Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung dalam upaya pencapaian kinerja selama 5 tahun.
2. Rencana Kerja 2025 ini merupakan kelanjutan daripada capaian kinerja tahun 2024.
3. Rencana Kerja 2025 adalah alat ukur sekaligus pedoman pelaksanaan kegiatan yang sudah digariskan dalam rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung yang didasarkan kepada situasi, kondisi, dan potensi Dinas.

Terkait dengan kebijakan nasional, BAPPERIDA Kabupaten Bandung selaku lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah, masuk kedalam Prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA) Prioritas 2 yakni Membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan arah kebijakan menguatnya tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DALDUKPPA Kabupaten Bandung**

Sasaran strategis merupakan pokok kegiatan dan program yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengarah pada meningkatkan Indeks pembangunan Manusia (IPM) dengan indikator peningkatan ***Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli***. Berdasarkan kondisi di atas maka sasaran strategis dituangkan dalam rencana kegiatan jangka waktu bulanan, semesteran, triwulan dan tahunan. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merumuskan sasaran untuk tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengendalian Angka Kelahiran
2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Optimalisasi Perlindungan perempuan & Anak.

**Tabel Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	<b>Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai AKIP			<b>69.16</b>
2				Presentase Aset Dalam kondisi Baik			<b>85.5</b>
3	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>
4	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen
5	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
6	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
7	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
8	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
9	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
10	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
11	<b>Meningkatnya ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>		<b>100%</b>
12	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan
13	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen
14	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan
15	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen
16	Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Laporan
17	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan
18	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen
19	<b>Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>
20	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
21	Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
22	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
23	<b>Meningkatnya ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>
24	Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit
25	Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen
26	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Dokumen
27	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
28	<b>Meningkatnya Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>
29	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket
30	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
31	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
32	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
33	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
34	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
35	Tersusunnya Laporan Penyediaan Bahan/Material	Tersusunnya Laporan Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Laporan
36	Tersusunnya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Laporan
37	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Dokumen
38	Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Paket
39	<b>Meningkatnya ketersediaan operasional perkantoran</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan operasional perkantoran</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan operasional perkantoran</b>		<b>100%</b>
40	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit
41	Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket
42	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit
43	<b>Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>
44	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
45	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
46	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
47	<b>Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>
48	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit
49	Terlaksananya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit
50	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit
51	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
52	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan</b>			<b>100%</b>
53				<b>Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD</b>			<b>0.058%</b>
54				<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>			<b>67.47</b>
55	<b>Meningkatnya lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender</b>	<b>Meningkatnya lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender</b>			<b>100%</b>
56	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	1 Dokumen

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	
57	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah
58	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah
59	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>100%</b>
60	Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi
61	<b>Meningkatnya lembaga pemberdayaan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG</b>	<b>Meningkatnya lembaga pemberdayaan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG</b>		<b>100%</b>
62	Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan terhadap Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan terhadap Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Lembaga
63	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas terhadap sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas terhadap sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang
64	<b>Meningkatnya Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan</b>	<b>Meningkatnya Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan</b>			<b>100%</b>
65	<b>Meningkatnya kegiatan pencegahan kekerasan perempuan yang dilaksanakan</b>	<b>Meningkatnya kegiatan pencegahan kekerasan perempuan yang dilaksanakan</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan perempuan yang dilaksanakan</b>		<b>2 kegiatan</b>
66	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen
67	<b>Meningkatnya layanan rujukan lanjutan terhadap kasus perempuan korban kekerasan</b>	<b>Meningkatnya layanan rujukan lanjutan terhadap kasus perempuan korban kekerasan</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>persentase kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan</b>		<b>100%</b>
68	Terlaksananya Layanan Pengaduan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang	Terlaksananya Layanan Pengaduan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Orang
69	<b>Meningkatnya Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga</b>	<b>Meningkatnya Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga</b>			<b>100%</b>
70	<b>Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1 Desa</b>
71	Tersusunnya Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan
72	<b>Meningkatnya layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah</b>	<b>Meningkatnya layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas</b>		<b>Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan</b>		<b>1 Kegiatan</b>

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
73	Tersusunnya Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
74	Meningkatnya keluarga yang terlayani dalam bidang KG dan hak anak	Meningkatnya keluarga yang terlayani dalam bidang KG dan hak anak	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase keluarga yang terlayani dalam bidang KG dan hak anak		100%
75	Terlaksananya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Terlaksananya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Layanan
76	Meningkatnya kecamatan yang melakukan pendataan data terpilah	Meningkatnya kecamatan yang melakukan pendataan data terpilah	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase kecamatan yang melakukan pendataan data terpilah			100%
77	Meningkatnya kecamatan yang melakukan data terpilah anak	Meningkatnya kecamatan yang melakukan data terpilah anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak			100%
78	Tersusunnya Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersusunnya Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	31 Dokumen
79	Tersusunnya Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Dokumen
80	Meningkatnya Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak	Meningkatnya Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak			100%
81	Meningkatnya lembaga PHA yang melakukan pendampingan hak anak	Meningkatnya lembaga PHA yang melakukan pendampingan hak anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga PHA yang melakukan pendampingan hak anak			100%
82	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	39 Organisasi
83	Meningkatnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina	Meningkatnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina		100%
84	Terlaksananya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang
85	Tersusunnya Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
86	Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			100%
87	Meningkatnya Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten	Meningkatnya Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten		2 kegiatan
88	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi
89	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen
90	Meningkatnya anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus	Meningkatnya anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		persentase anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus		100%
91	Terlaksananya Layanan Pengaduan Kewenangan	Terlaksananya Layanan Pengaduan Kewenangan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi			Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	310 Orang

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Kabupaten/Kota terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan	Kabupaten/Kota terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	
92	Tersusunnya Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
93	<b>Meningkatnya Pengendalian Penduduk</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian Penduduk</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>TFR (angka kelahiran total)</b>			<b>2.42</b>
94				<b>Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)</b>			<b>69.15</b>
95				<b>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)</b>			<b>9.97</b>
96	<b>Meningkatnya kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi</b>	<b>Meningkatnya kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>		<b>persentase kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi</b>		<b>100%</b>
97					<b>-persentase penanganan pengendalian penduduk</b>		<b>100%</b>
98	Tersusunnya Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen
99	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	3 Laporan
100	Terlaksananya Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Terlaksananya Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	N/A
101	Terlaksananya Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	10 organisasi
102	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	N/A
103	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	2 Laporan
104	Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Dokumen
105	Tersusunnya Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Tersusunnya Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	3 Laporan
106	Tersusunnya Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tersusunnya Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	N/A
107	<b>Meningkatnya data pengendalian penduduk yang diimplementasikan</b>	<b>Meningkatnya data pengendalian penduduk yang diimplementasikan</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>persentase data pengendalian penduduk yang diimplementasikan</b>		<b>100%</b>
108	Tersusunnya Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	Tersusunnya Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	Perumusan Parameter Kependudukan			Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 Laporan
109	Tersusunnya Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Tersusunnya Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen
110	Tersusunnya Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Tersusunnya Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen
111	Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	N/A
112	Tersedianya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Tersedianya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	2 Unit
113	Tersusunnya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Tersusunnya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan
114	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen
115	Tersusunnya Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tersusunnya Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan
116	Tersusunnya Dokumen Pengolahan dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Pengolahan dan Pelaporan	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data	2 Dokumen

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
117	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	2 Laporan
118	<b>Meningkatnya pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru</b>	<b>Meningkatnya pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru</b>			<b>83%</b>
119	<b>Meningkatnya Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB</b>	<b>Meningkatnya Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>		<b>Pesentase Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB</b>		<b>100%</b>
120	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi
121	Tersusunnya Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tersusunnya Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Dokumen
122	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen
123	Digunakannya Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Digunakannya Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Penitran Program KKBPK			Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
124	Tersusunnya Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Tersusunnya Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Laporan
125	Tersusunnya Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Tersusunnya Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	31 Laporan
126	<b>Meningkatnya pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina</b>	<b>Meningkatnya pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>		<b>Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina</b>		<b>31 kecamatan</b>
127	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi
128	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	1 Unit
129	Tersusunnya Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Tersusunnya Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan
130	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4.643 Orang
131	<b>Meningkatnya pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB</b>	<b>Meningkatnya pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB</b>		<b>100%</b>
132	Tersusunnya Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tersusunnya Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	79 Laporan
133	Terlaksananya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	21000Orang
134	Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	12 Laporan

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
135	Terlaksananya Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Terlaksananya Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Peningkatan Kesetaraan KB Pria			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	32 Orang
136	<b>Meningkatnya PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB</b>	<b>Meningkatnya PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB</b>		<b>persentase PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB</b>		<b>100%</b>
137	Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	1 Organisasi
138	Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	97 Kampung
139	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	
140	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	
141	<b>Meningkatnya pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera</b>	<b>Meningkatnya pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Presentase pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera</b>			<b>100%</b>
142	<b>Meningkatnya kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga</b>	<b>Meningkatnya kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga</b>		<b>100%</b>
143	Tersedianya Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.000 Unit
144	Tersusunnya Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersusunnya Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan
145	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	95 Orang
146	Tersusunnya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Tersusunnya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan
147	Terlaksananya Sosialisasi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Sosialisasi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Sosialisasi IPK			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	40 Orang
148	<b>Meningkatnya Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>Persentase Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten</b>		<b>100%</b>
149	Tersusunnya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Tersusunnya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 laporan

### 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi DALDUKPPA

Di dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung yang selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran terdapat 10 program 29 kegiatan dan 93 sub kegiatan anggaran pembangunan untuk dilaksanakan pada tahun 2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka

mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Bandung, sedangkan untuk anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat alokasi anggaran pada perencanaan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 31.774.946.912,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah).

Menindaklanjuti Program Prioritas Anggaran tahun 2025 sebagai rencana kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung, maka kebijakan Dinas P2KBP3A masuk dalam prioritas kesehatan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja 2025 sebagai berikut:

1. Mengurangi kasus kekerasan dengan fokus pada pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang dan KDRT;
2. Penguatan lembaga layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah Kecamatan;
3. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus terhadap anak;
4. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak;
5. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk melalui kegiatan pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan pembinaan kelestarian Pus ber-KB yang diarahkan ke MKJP ;
6. Membuat rumusan kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas dan kinerja pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DALDUKPPA Tahun 2025**

Rencana Kerja merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman operasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Kerja tersebut menggambarkan tentang Program, kegiatan dan sub kegiatan, Anggaran, sarana dan prasarana tempat dan waktu kegiatan serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung pada periode tahun 2025 adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran tahun 2025.

Untuk Tahun 2025 DALDUKPPA Kabupaten Bandung telah menyusun 10 Program, 29 Kegiatan dan 95 Sub Kegiatan. Dengan total anggaran sebesar Rp 31.774.946.912,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah).

Dengan demikian program dan kegiatan dilaksanakan oleh DALDUKPPA Kabupaten Bandung secara strategis untuk mendukung Program Prioritas Anggaran yang secara umum untuk dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung tahun 2023 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
5. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
6. Program Perlindungan Perempuan
7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
8. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
10. Program Perlindungan Khusus Anak

Dengan demikian diharapkan melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung dapat mendukung keberhasilan program pembangunan secara keseluruhan.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, BAPPEDALITBANGDA Kabupaten Bandung menyusun suatu instrumen pelaksanaan teknis dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Sebagai salah satu instrumen, program akan mencakup satu atau beberapa kegiatan. Adapun sub kegiatan sebagai turunan dari kegiatan, serta kegiatan merupakan turunan program akan mencakup tindakan-tindakan pengeralihan sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun barang modal termasuk didalamnya peralatan dan teknologi sebagai input untuk menghasilkan output kegiatan yang telah ditargetkan.

Adapun Rencana Kerja dan pendanaan DALDUKPPA Kabupaten Bandung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025**  
**BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 KABUPATEN BANDUNG**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			31.877.946.912,00	34.312.571.209,88	59.204.967.346,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			31.877.946.912,00	34.312.571.209,88	59.204.967.346,00					
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.006.470.000,00	2.720.829.050,00	1.827.342.190,00					
1	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100 12 68,07 % %	100 12 68,07 % %	790.000.000,00	1.234.462.700,00	792.231.850,00				
	2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender	100 %	100 %	195.000.000,00	281.430.000,00	281.430.000,00	masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG										
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	206.436.000,00	80.975.400,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota										
						Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	50 Orang	50 Orang	80.000.000,00	51.184.000,00	46.684.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota										
						Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	50 Orang	50 Orang	35.000.000,00	23.810.000,00	22.755.300,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
														PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 %	50 %	120.000.000,00	498.501.500,00	498.501.500,00		masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi										
							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi	2 Organisasi	120.000.000,00	498.501.500,00	187.285.950,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG	100 %	100 %	475.000.000,00	454.531.200,00	454.531.200,00		masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Lembaga	2 Lembaga	475.000.000,00	454.531.200,00	454.531.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan	100 %	100 %	125.000.000,00	110.440.600,00	82.832.860,00				
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan perempuan yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	60.000.000,00	47.860.600,00	47.860.600,00		masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	50 Dokumen	60.000.000,00	47.860.600,00	19.855.300,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
														PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	100 %	100 %	65.000.000,00	62.580.000,00	62.580.000,00	masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Orang	30 Orang	65.000.000,00	62.580.000,00	62.977.560,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
3	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga	100 %	100 %	344.813.000,00	588.721.100,00	446.667.200,00				
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Desa	1 Desa	160.000.000,00	156.375.000,00	156.375.000,00	masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	156.375.000,00	71.605.300,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	70.000.000,00	47.125.900,00	47.125.900,00	masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	04	2.02	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	47.125.900,00	47.125.900,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
														PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	114.813.000,00	385.220.200,00	385.220.200,00			masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Layanan	50 Layanan	114.813.000,00	385.220.200,00	327.936.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
4	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data terpilah anak	100 %	100 %	144.000.000,00	141.455.000,00	66.246.000,00				
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak	100 %	100 %	144.000.000,00	141.455.000,00	141.455.000,00		masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	31 Dokumen	31 Dokumen	74.000.000,00	99.700.000,00	42.171.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	41.755.000,00	24.075.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
5	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak	100 %	100 %	172.657.000,00	151.507.550,00	113.662.350,00				
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak	100 %	100 %	70.000.000,00	66.779.950,00	66.779.950,00		masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Kewenangan Kabupaten/Kota								DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	39 Organisasi	39 Organisasi	70.000.000,00	66.779.950,00	50.209.950,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina	100 %	100 %	102.657.000,00	84.727.600,00	84.727.600,00	masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Orang	51 Orang	72.657.000,00	66.997.300,00	49.577.100,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	17.730.300,00	13.875.300,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
6	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 %	100 %	430.000.000,00	494.242.100,00	325.701.930,00				
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten	2 kegiatan	2 kegiatan	115.000.000,00	198.936.500,00	198.936.500,00	masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA										
						Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	50 Orang	55.000.000,00	148.600.000,00	42.781.100,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
														PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota										
						jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	50 Dokumen	50 Dokumen	60.000.000,00	50.336.500,00	23.400.530,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus	100 %	100 %	315.000.000,00	295.305.600,00			masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	50 Orang	45.000.000,00	25.950.300,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK										
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	30 Layanan	30 Layanan	270.000.000,00	269.355.300,00	259.520.300,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			29.871.476.912,00	31.591.742.159,88	57.377.625.156,00					
	7	2	14	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Presentase Aset Dalam kondisi Baik	69,46 87 Poin %	80,36 87 Poin %	24.043.356.912,00	25.284.894.270,88	26.214.563.539,00				
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	139.000.000,00	123.347.800,00	123.347.800,00			DP2KBP3A	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	52.000.000,00	46.546.500,00	45.496.500,00	Kab. Bandung, Semua	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
														PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	20 Data	20 Data	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	22.753.882.912,00	23.990.626.070,88	23.990.626.070,88		DP2KBP3A	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/bulan	97 Orang/bulan	22.703.882.912,00	23.946.316.470,88	25.284.331.039,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	8.785.000,00	8.785.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	8.000.000,00	5.475.000,00	2.465.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	5.050.000,00	3.100.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	24.999.600,00	2.622.600,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	50.000.000,00	42.090.400,00	42.090.400,00		DP2KBP3A	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	20.660.400,00	16.500.400,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	21.430.000,00	21.430.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 %	100 %	97.900.000,00	84.250.000,00	84.250.000,00		DP2KBP3A	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	218 Paket	218 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan,	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	11.452.000,00	10.216.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.999.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material										
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	24.170.000,00	24.170.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	12 Laporan	100.574.000,00	98.430.000,00	23.746.685,00	Kab. Bandung, Semua	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Kecamatan, Semua Kel/Desa		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 %	100 %	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		DP2KBP3A	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	379.000.000,00	467.000.000,00	467.000.000,00		DP2KBP3A	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	388.000.000,00	402.373.715,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	273.000.000,00	273.000.000,00			DP2KBP3A	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.000.000,00	42.000.000,00	35.350.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	51 Unit	121.000.000,00	121.000.000,00	87.450.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
8	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need) TFR (angka kelahiran total)	10,10 2,27 79,25 %	10,10 2,27 79,25 %	272.000.000,00	220.621.189,00	757.840.968,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Kelahiran/lbu Angka	Kelahiran/lbu Angka								
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	persentase kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi	100 %	100 %	108.000.000,00	100.901.200,00	100.901.200,00		masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota										
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	16.635.300,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	02	2.01	0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan										
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	3 Organisasi	3 Organisasi	18.000.000,00	17.859.300,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal										
						Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	20.000.000,00	18.175.300,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana										
						Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000,00	48.231.300,00	5.016.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase data pengendalian penduduk yang diimplementasikan	100 %	100 %	164.000.000,00	119.719.989,00	119.719.989,00		masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga										
						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.120.000,00	60.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga										
						Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	2 Dokumen	25.250.000,00	14.083.000,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga										
						Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	6.530.000,00	279.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB										
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	36.970.000,00	408.970.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain										
						Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	2 Unit	2 Unit	38.750.000,00	37.036.300,00	546.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	02	2.02	0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.248.721,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana										
						Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	5.598.968,00	4.308.968,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)										
						Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.133.000,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
9	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru	83.48 %	83.48 %	5.093.120.000,00	5.660.044.200,00	13.221.375.296,00				
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pesentase Institusi masyarakat pedesaan yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa	100 %	100 %	235.450.000,00	140.231.200,00	140.231.200,00	masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK										
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	31 Laporan	31 Laporan	30.000.000,00	15.030.000,00	8.205.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana										
						Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	31 Laporan	0,00	0,00	620.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB- KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)										
						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Laporan	2 Laporan	60.450.000,00	0,00	465.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKB- KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang										
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.800.000,00	67.650.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKB- KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal										
						Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	85.000.000,00	71.620.900,00	3.900.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja										
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 Organisasi	2 Organisasi	40.000.000,00	33.780.300,00	200.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKB- KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	31 kecamatan	31 kecamatan	4.486.500.000,00	5.216.979.100,00	5.216.979.100,00			masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB										
						Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	150 Unit	150 Unit	30.000.000,00	23.750.000,00	0,00	Kab. Bandung, Semua	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,		





No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga							PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)											
						Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	1 Laporan / Dokumen	0,00	0,00	9.600.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB- KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))											
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	92.401.600,00	31.927.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))											
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	15.900.000,00	169.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKB- KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))											
						Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	95 Orang	95 Orang	75.000.000,00	50.340.000,00	7.056.200,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))											
						Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	68.687.300,00	17.875.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	04	2.01	0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	40 Orang	40 Orang	25.000.000,00	90.545.300,00	23.301.400,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan,	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
														PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	100	100	158.000.000,00	108.308.300,00	108.308.300,00		masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja										
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	2 Laporan	158.000.000,00	108.308.300,00	173.085.753,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)										
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	8376 laporan	0,00	0,00	8.376.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB- KB		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)										
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	8376 laporan	0,00	0,00	8.376.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB- KB		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								<b>J U M L A H</b>			<b>31.877.946.912,00</b>	<b>34.312.571.209,88</b>	<b>59.204.967.346,00</b>			

## Pengembangan Riset dan Inovasi

Beberapa inovasi pelayanan masyarakat juga di kembangkan oleh DALDUKPPA guna merespon terhadap tantangan pembangunan yang ada, inovasi tersebut meliputi:

**Tabel IV.2**  
**Inovasi DALDUKPPA**

NO	INOVASI	Tujuan
1	PUSAKA (Pasangan Usia Subur dan Akseptor Karawat)	Untuk mengendalikan angka Drop Out sehingga akan berkontribusi terhadap pengendalian LPP dan menurunkan angka TFR.
2	WASKAT (Pengawasan Melekat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersediannya sistem pengendalian terhadap kinerja para petugas lapangan</li> <li>2. Tersediannya alat pantau untuk mengukur, menilai, mengevaluasi capaian kinerja petugas lapangan</li> <li>3. Tersediannya alat untuk mengarahkan proses kerja kearah tercapainya tujuan Organisasi</li> <li>4. Tersediannya alat pantau untuk menciptakan budaya kerja yang baik</li> <li>5. Tersediannya alat pantau untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang profesional</li> </ol>
3	BEDAS SAPUJAGAT (Berencana Dewasakan anak agar sejahtera sinergiatas Akselerasi Pendewasaan Usia Kawin Terjaga Keluarga Sehat )	Menegakan pendewasaan usia kawin di masyarakat agar menurunnya perkawinan anak yang berdampak pada kesehatan keluarga baik dari segi kesehatan fisik dan psikis serta mendukung program penurunan AKI dan AKB.
4	SIDUGA BEDAS (Sistem Inforamsi Kependudukan)	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
5	PPRG BEDAS (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Bersinergi dalam anggaran responsif gender)	Adanya Dokumen PPRG yang terdiri dari Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statment (GBS) dan TOR Responsif Gender yang dapat mengeluarkan nilai ARG
6	SIPETIK BEDAS (Sistem Informasi Pelaporan Tindak Kekerasan Daerah dalam pelayanan Kekerasan)	melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Bandung dan mempermudah Masyarakat Kabupaten Bandung dalam melaporkan tindak Kekerasan
7	BEDAS BERLIAN (Bersama Lindungi Anak Berkeadilan dan Berintegritas)	Adanya dokumen eviden untuk penilaian kabupaten layak anak sekaligus evaluasi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di kabupaten Bandung

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan Rencana Kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan yang selanjutnya dibuat strategi untuk mengatasi masalah yang terjadi sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan

Sumber dana realisasi tahun anggaran 2025 berasal dari APBD dan APBN yang di gunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam pembangunan. Pelaksanaan tupoksi merupakan upaya pengembangan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diusahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah. Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan yang proposional. Upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai, baik teknis maupun non teknis, dengan renstra dan Rencana Kerja 2025 diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan melibatkan stakeholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan.

Secara umum keberhasilan program KB dan Pemberdayaan Perempuan telah memberikan kontribusi untuk pembangunan di Kabupaten Bandung. Walaupun dengan keterbatasan anggaran sehingga masih banyak yang perlu ditingkatkan.

Pengendalian penduduk pada tahun 2023 akan tercapai bila Total Fertility Rate (TFR) menurun atau rata-rata kelahiran hanya 2 orang anak, kondisi ini akan terwujud apabila seluruh keluarga ikut KB dan memakai alat kontrasepsi. Tentunya untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan anggaran serta kebijakan dari pemerintah yang cukup besar untuk mendukung program dan kegiatan.

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan DALDUKPPA tahun 2025 ini. Diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

KEPALA DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

ttd

H. MUHAMAD HAIRUN

BUPATI BANDUNG

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

**Form E.70**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG**

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan Data dan Informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra-perangkat daerah.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
6	Penelaahan Rancangan RKPD.	√			
7	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.		√	Tidak ada usulan masyarakat	
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten.	√			
10a.	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√	Tidak ada usulan masyarakat	
10b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
10c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
12.	Program dan kegiatan antar perangkatdaerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerahtelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan.	√			

KEPALA DINAS  
 PENGENDALIAN PENDUDUK,  
 KELUARGA BERENCANA,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 DAN PERLINDUNGAN ANAK

ttd

H. MUHAMAD HAIRUN